

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi secara paling sederhana dapat diartikan sebagai pertambahan output atau pertambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu, misalkan satu tahun. Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika balas jasa riil terhadap penggunaan faktor - faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Dengan demikian, pengertian pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu (Prasetyo, 2009:237).

Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan “output perkapita“. Dalam pengertian ini ada dua sisi yang perlu diperhatikan yaitu output total dan jumlah penduduk, sebab hanya apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan output perkapita bisa dijelaskan. Selanjutnya aspek yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi perspektif waktu jangka panjang, yaitu apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapita menunjukkan kecenderungan yang jelas untuk menaik (Boediono, 2009:1-2).

Menurut Sukirno (2013:423) dapat dikatakan bahwa istilah pertumbuhan ekonomi ialah alat untuk menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan suatu ekonomi. Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal. Tetapi dengan menggunakan berbagai jenis data produksi akan tidak tampak jelas memberikan gambaran tentang pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Oleh sebab itu untuk memberikan suatu gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan maka penulis menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berubah secara tahun ke tahun berdasarkan pengukuran yang bisa dilihat melalui meningkatnya output perkapita yang sekaligus memberikan dampak terhadap masyarakat untuk mengkonsumsi barang dan jasa.

2.1.2 Model Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik

Perkembangan kemajuan teknologi dan faktor-faktor dari produksi merupakan faktor terpenting yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu periode tertentu. Perkembangan dari waktu ke waktu lainnya, pemerintah telah ikut campur tangan dalam perekonomian negara sejak diterapkannya sistem pajak dan kemungkinan akan terjadi inflasi melihat bagaimana setiap faktor produksi dan perkembangan teknologi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta menganalisis sumbangan dari perkembangan stok modal dan perkembangan teknologi dalam pembangunan ekonomi.

Adapun menurut pendapat para ahli mengenai aliran neo-klasik yakni sebagai berikut:

a. Teori Robert Solow

Robert Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern dan hasil atau output. Teori ini mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk dapat berdampak negatif dan dapat pula berdampak positif. Oleh karenanya, menurut Robert Solow penambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif. Adapun model pertumbuhan ekonomi Neo Klasik Solow (*Solow Neo Classical Growth Model*) maka fungsi produksi agregat standar adalah sama.

b. Teori Harrod Domar

Harrod Domar mengemukakan bagaimana caranya suatu perekonomian tumbuh pada tahap yang teguh (steady growth) dalam jangka panjang. Teori pertumbuhan ini juga menjelaskan bagaimana agar kapasitas barang modal dalam jangka panjang, diperlukan penambahan pengeluaran agregat. Teori ini

mencerminkan bahwa modal harus dipergunakan secara efektif, dikarenakan pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut. Teori ini juga membahas tentang pendapatan nasional dan kesempatan kerja.

Dari teori klasik yang diteruskan menjadi neo-klasik menganjurkan agar kondisi selalu diarahkan untuk menuju pasar sempurna. Dengan keadaan pasar yang sempurna, perekonomian bisa tumbuh secara maksimal. Hal penting yang perlu dicatat juga adalah bahwa model neoklasik mengasumsikan $I=S$. Hal ini berarti kebiasaan masyarakat yang suka memegang uang tunai dalam jumlah besar dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

c. Teori Pertumbuhan Endogen

Teori pertumbuhan endogen memiliki perspektif yang lebih luas dengan teori pertumbuhan sebelumnya. Beberapa ahli ekonom menganggap bahwa kunci pertumbuhan ekonomi terdapat pada akumulasi modal yang diperoleh dari akumulasi tabungan domestik. Permasalahan yang dihadapi di negara berkembang adalah kurangnya kemampuan untuk mengakumulasi tabungan. Oleh karena itu negara berkembang biasanya mencari pinjaman, bantuan atau investasi asing.

d. Teori Pertumbuhan Baru (New Growth Theory)

Teori pertumbuhan baru menekankan bahwa hasil pertumbuhan dari peningkatan pengembalian yang diasosiasikan dengan pengetahuan baru. Pengetahuan mempunyai kepemilikan berbeda dibandingkan barang ekonomi lain (nonrival, dan excludable). Kemampuan untuk perekonomian tumbuh dengan peningkatan pengetahuan dibandingkan tenaga kerja atau modal menciptakan kesempatan untuk mendekati tanpa batas pertumbuhan. Kegagalan pasar untuk menghasilkan pengetahuan yang cukup disebabkan oleh inovator tidak dapat mengambil semua keuntungan yang diasosiasikan dengan penciptaan teknologi baru. Disebabkan pengetahuan dapat menuju biaya marjinal nol, perusahaan yang menggunakan pengetahuan dapat menghasilkan keuntungan monopoli. Teori pertumbuhan baru dan peningkatan pengembalian pengetahuan mempunyai banyak implikasi untuk kebijaksanaan pembangunan ekonomi

Berdasarkan definisi yang dikemukakan maka penulis menyimpulkan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat melalui akumulasi modal yang dipengaruhi melalui tenaga kerja yang berpendidikan sehingga memberikan keberhasilan terhadap hasil produksi barang dan jasa.

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

a. Wilayah Domestik dan Regional

Menurut Badan Pusat Statistik (2016) pengertian domestik/regional disini dapat merupakan Propinsi atau Daerah Kabupaten/Kota. Transaksi Ekonomi yang akan dihitung adalah transaksi yang terjadi di wilayah domestik suatu daerah tanpa memperhatikan apakah transaksi dilakukan oleh masyarakat (residen) dari daerah tersebut atau masyarakat lain (non-residen).

b. Produk Domestik

Menurut Badan Pusat Statistik (2016) produk domestik adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk daerah tersebut ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk daerah tersebut. Dengan adanya arus pendapatan yang mengalir antar daerah ini (termasuk juga dari dan ke luar negeri) yang pada umumnya berupa upah/gaji, bunga, deviden dan keuntungan maka timbul perbedaan antara produk domestik dan produk regional.

c. Produk Regional

Menurut Badan Pusat Statistik (2016) produk regional merupakan produk domestik ditambah dengan pendapatan dari faktor produksi yang diterima dari

luar daerah/negeri dikurangi dengan pendapatan dari faktor produksi yang dibayarkan ke luar daerah/negeri. Jadi produk regional merupakan produk yang ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh residen.

d. PDRB Harga Konstan

Menurut Badan Pusat Statistik (2016) Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto disini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan maka penulis menyimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha yang merupakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit dalam suatu daerah tertentu.

2.1.4 Investasi

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri sedangkan penanaman modal asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Menurut Sukirno (2014) Investasi diartikan ialah sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam suatu modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan juga perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan juga jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan maka penulis menyimpulkan investasi adalah penanaman modal dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang.

2.1.5 Tenaga Kerja

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk pemenuhan kebutuhan hidup sendiri maupun masyarakat.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia adalah minimum 10 tahun, tanpa batas umur maksimum, Jadi setiap orang atau penduduk yang sudah berusia 10 tahun keatas, tergolong sebagai tenaga kerja.

a. Teori Human Capital

Human capital adalah suatu istilah yang sering digunakan para ekonom untuk pendidikan, kesehatan, dan kapasitas manusia yang dapat meningkatkan produktivitas jika hal-hal tersebut ditingkatkan. Setelah investasi awal dilakukan, maka akan dihasilkan suatu aliran pendapatan masa depan dari perbaikan pendidikan dan kesehatan. Sebagai akibatnya, suatu tingkat pengembalian (rate of return) dapat diperoleh dan dibandingkan dengan pengembalian dari investasi yang lain.

Terdapat pendekatan penting dalam teori human capital ini, menurut Nelson-Phelp menyimpulkan bahwa human capital merupakan faktor yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Munculnya perbedaan dalam tingkat pertumbuhan di berbagai negara lebih disebabkan oleh perbedaan dalam stock human capital. Adanya peningkatan stock human capital akan meningkatkan

pendapatan suatu negara melalui produktivitas tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan akibat pendidikan yang diperoleh.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan maka penulis menyimpulkan tenaga kerja merupakan manusia yang memiliki keahlian atau kemampuan yang dipergunakan untuk bekerja agar menghasilkan barang atau jasa dengan batasan usia 10 tahun keatas.

2.1.6 Tingkat Pendidikan

Menurut UU No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara. Dengan kata lain, pendidikan adalah suatu modal utama seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Seseorang yang memiliki pendidikan tinggi cenderung memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan seseorang yang tidak berpendidikan. Jadi, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi pula pendapatan yang diterima.

Menurut Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendidikan yaitu sebuah proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai obyek tertentu dan spesifik. Pengetahuan yang diperoleh secara formal tersebut berakibat pada setiap individu yaitu memiliki pola pikir, perilaku dan akhlak yang sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan maka penulis menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan adalah suatu usaha dalam proses pembelajaran bagi setiap individu yang dengan sengaja dipilih untuk membantu dan mempengaruhi anak mencapai pengetahuan dan pemahaman yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani dan akhlak mengenai objek tertentu dan spesifik sehingga secara perlahan bisa mengantarkan anak kepada tujuan dan cita-citanya.

2.1.7 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

APBD adalah rencana keuangan yang dibuat pemerintah daerah setiap tahunnya, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD di tetapkan dengan Peraturan Daerah dimana tahun anggaran APBD meliputi satu tahun, mulai dari tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember

Secara umum sumber pendapatan daerah terbagi dalam dua kelompok, yaitu pendapatan daerah dan dana perimbangan.

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun Daerah yang bersangkutan. Pendapatan Daerah yang dimaksud bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan.

b. Belanja Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang No.33 tahun 2004 disebutkan bahwa Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Anggarini, dkk (2010:132) belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) klasifikasi ekonomi belanja daerah terbagi dalam dua kelompok, yaitu:

1. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, asset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

2. Belanja Operasi

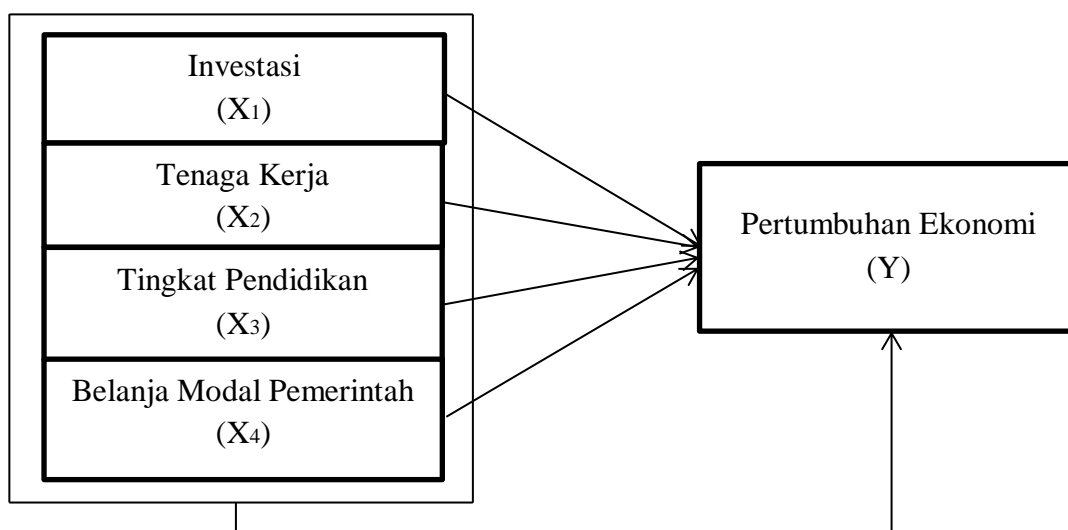
Belanja Operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari Kas Umum Negara/Daerah dalam rangka menyelenggarakan operasional pemerintah. Belanja Operasi selanjutnya diklasifikasikan lagi menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Lain-lain/Tak Terduga.

Menurut Mahmudi (2009) istilah belanja pada umumnya hanya digunakan di sektor publik, tidak disektor bisnis. Belanja di sektor publik terkait dengan penganggaran, yaitu menunjukkan jumlah uang yang telah dikeluarkan selama satu tahun anggaran.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan maka penulis menyimpulkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk kewajiban dalam melaksanakan pelaksanaan kegiatan pemerintah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasari oleh teori yang dikembangkan oleh Solow-Swan pada model pertumbuhan ekonomi Neo Klasik (Solow Neo Classical Growth). Skema hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Penelitian Terhadulu

Dapat dilihat pada gambar 2.2 ini adalah dari hasil penelitian terdahulu

| Peneliti | judul | Variable | Hasil |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eko Prasetyo (2011) | Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Tenaga Kerja, dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah | Variabel Bebas X ₁ = PMDN X ₂ = PMA X ₃ = Tenaga Kerja X ₄ = Ekspor Variabel Terikat Y = Pertumbuhan Ekonomi | PMDN berpengaruh positif dan signifikan, PMA berpengaruh negative dan tidak signifikan, tenaga kerja positif dan ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi |
| Hendarmin (2012) | Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat | Variabel Bebas X ₁ = Belanja Modal X ₂ = Investasi Swasta Variabel Terikat Y ₁ = Pertumbuhan Ekonomi Y ₂ = Kesempatan Kerja Y ₃ = Kesejahteraan Masyarakat | Variabel investasi swasta berpengaruh signifikan tapi berslope negative dan variabel belanja modal memiliki slope positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel belanja modal berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan investasi swasta memiliki slope positif namun tidak signifikan terhadap kesempatan kerja. Terhadap kesejahteraan masyarakat |

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | pengaruh belanja modal dan investasi swasta berpengaruh signifikan namun slope dari pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai yang negatif |
| Avanda Fahri Atahrim (2013) | Analisis Pengaruh Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah | Variabel Bebas X ₁ = Tenaga Kerja X ₂ = Pengeluaran Pemerintah Variabel Terikat Y = Pertumbuhan Ekonomi | Tenaga kerja sektor industri dan pengeluaran pemerintah sektor industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi di pulau jawa |
| Lukman Hakim (2013) | Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Kab/Kota di Pulau Jawa dan Bali) | Variabel Bebas X = Belanja Modal Variabel Terikat Y = Pertumbuhan ekonomi | Belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi |
| Phany Ineke Putri (2014) | Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Belanja Modal, dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa | Variabel Bebas X ₁ = Investasi X ₂ = Tenaga Kerja X ₃ = Belanja Modal X ₄ = Infrastruktur Variabel Terikat Y = Pertumbuhan Ekonomi | Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu PMDN, PMA, tenaga kerja, belanja modal, infrastruktur yang meliputi jalan aspal, dan listrik mempunyai pengaruh yang positif signifikan, sedangkan variabel jalan tidak aspal berpengaruh |

| | | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa |
| Denty Octavianingrum (2015) | Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta: Studi 5 Kabupaten/Kota | Variabel Bebas X ₁ = Investasi X ₂ = Tenaga Kerja X ₃ = Tingkat Pendidikan Variabel Terikat Y = Pertumbuhan Ekonomi | Variabel bebas yang diteliti pada kabupaten/kota provinsi DIY berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi |
| Hafi Diana Pratiwi (2015) | Pengaruh Investasi, Modal Insani, dan Belanja Modal Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa | Variabel Bebas X ₁ = Investasi X ₂ = Modal Insani X ₃ = Belanja Modal Variabel Terikat Y = Pertumbuhan Ekonomi | Variabel Investasi, Modal Insani, Belanja Modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa |
| Rusmarinda Rakhmawati (2016) | Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tenaga Kerja, dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah | Variabel Bebas X ₁ = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) X ₂ = Tenaga Kerja X ₃ = Tingkat Pendidikan Variabel Terikat Y = Pertumbuhan Ekonomi | Variabel IPM berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan dan variabel tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan. |
| Singgih Samsuri (2016) | Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah | Variabel Bebas X ₁ = Belanja Modal, X ₂ = | Variable belanja modal dan belanja operasi |

| | | | |
|--|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Se-Sumatera | Belanja Operasi Variabel Terikat $Y = PDRB$ | pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto |
|--|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Gambar 2.2
Penelitian Terdahulu

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori yang telah dilakukan dan pertimbangan pada penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Investasi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi pulau Sumatera
2. Tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi pulau Sumatera
3. Tingkat pendidikan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi pulau Sumatera
4. Belanja modal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi pulau Sumatera
5. Investasi, tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan belanja modal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi pulau Sumatera